



e-Modul

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



XII



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
2019**

e-Modul



Judul materi

Penyusun :

Susi Ahiryani Siregar
SMA Negeri 2 Plus Sipirok

Reviewer :

Drs. Endro Santoso, M.M.

Validator :

Drs. Samsiar, M.Si

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Glosarium

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa

Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup

Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia

Konstitusi adalah hukum dasar yang menetapkan dan mengatur pemerintahan

Nilai harga; adalah sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia

Nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), nilai-nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya

Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Norma adalah aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala macam peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan

Pengadilan adalah tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum

Peradilan adalah proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan

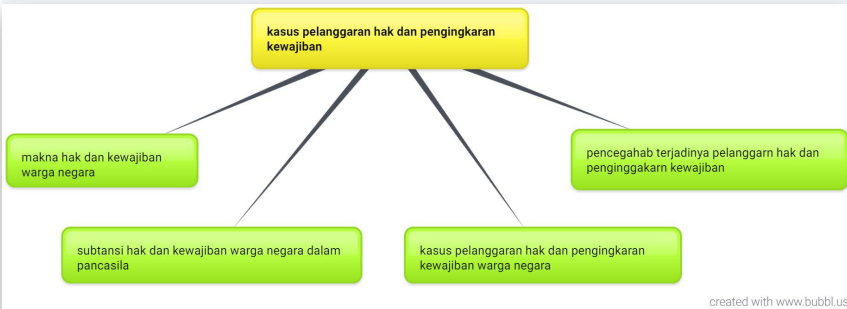
Politik adalah strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/ negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara

Rakyat adalah kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara



Daftar Isi

Peta Konsep



Gambar :
Peta Konsep : princessayu4.blogspot.com/2013/11/peta-konsep-transpor-aktif



Daftar Isi

Daftar Isi

Daftar Isi

Peta Konsep

Glosarium

Pendahuluan

Identitas Modul

Kompetensi Dasar

Deskripsi

Petunjuk Penggunaan Modul

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran I

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman

4. Latihan Essay

5. Latihan Pilihan Ganda

6. Penilaian Diri

Evaluasi

Daftar Pustaka

Pendahuluan

IDENTITAS MODUL

Nama Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas / Semester / Alokasi Waktu	: XII / I (Satu) / 2 JP
Judul eModul	: Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

KOMPETENSI DASAR


- 3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - 3.1.1 Menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara..
 - 3.1.2 Menganalisis contoh kasus peningkaran kewajiban warga negara.
 - 3.1.3 Menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara
 - 3.1.4 Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga.

DESKRIPSI

Selamat ya, Anda sekarang sudah duduk di kelas XII. Ini berarti Anda tinggal satu tahun lagi belajar di jenjang SMA/SMK/MA/MAK. Dengan kata lain, sebentar lagi Anda akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut bisa terwujud tentu saja bergantung pada usaha Anda dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan Anda hadapi di kelas XII. Oleh karena itu, Anda harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran.

Pada modul ini, Anda akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di akhir pembelajaran pada bab ini, diharapkan Anda menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, Anda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban dari pada hak. Anda baru menuntut hak, setelah kewajiban dilakukan.

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Buka materi ini di android dengan terlebih dahulu install di playstore aplikasi 

Setelah materi kalian pelajari, silakan lakukan evaluasi

Silakan lakukan proses belajar sebagai bentuk penugasan terstruktur, uraikan jawaban kalian di buku..

"Pendidikan setingkat dengan olahraga dimana memungkinkan setiap orang untuk bersaing" – **Joyce Meyer**

"Sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis dan praktis." – **Azis White**.

MATERI PEMBELAJARAN

Hallo calon pemimpin masa depan, kalian sekarang akan mempelajari KD 3.1 pada kelas XII

Tetapi sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian membaca berita dibawah ini :

Pada modul kali ini materi yang akan kita bahas adalah:

- Makna hak dan kewajiban warga negara.
- Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila.
- Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
- pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.

Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan Pembelajaran I

1. TUJUAN

Pada pertemuan ini kalian diharapkan mampu memahami tentang :

1. Makna hak dan kewajiban warga negara
2. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila.
 - Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila.
 - Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila.
 - Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila
3. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
 - Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
 - Kasus pelanggaran hak warga negara.
 - Kasus pengingkaran kewajiban warga Negara.
4. pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara

Sebelum kalian memulai pelajaran ini sebaiknya kalian awali dengan doa, semoga apa yang diharapkan dapat tercapai. Amiin.

Tetapi sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian membaca berita dibawah ini :

"Mendagri: Partisipasi Pilpres 70 Persen Sudah Luar Biasa"
Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Gamawan Fauzi mengapresiasi tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli lalu. Dia menilai, partisipasi pemilih Pilpres mencapai 70 persen adalah luar biasa. "Ini (partisipasi pemilih) 70 persen itu luar biasa. Sudah bagus," kata Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,14 persen. Sedangkan pada

Pilpres 2009 partisipasi pemilih adalah 72 persen. Namun, dia mengatakan, angka 70 persen bukan angka yang buruk. Pada Pileg tercatat ada 124.972.491 suara sah. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif 2014 mencatatkan 185.826.024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun total pemilih yang tercatat dalam DPT pilpres sebanyak 190.307.134 orang. Jumlah ini meningkat 2.454.142 orang dari DPT Pileg. Penurunan tingkat partisipasi di Pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara

Nah, setelah Anda mencermati berita tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini

1. Apakah Golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
2. Menurut Anda, apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan?
3. Coba Anda rumuskan solusi untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi rakyat pada kegiatan pemilihan umum !

" Setitik embun dapat melembabkan daun daunan, sederas hujan dapat membasahi daun beserta dahannya sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membasahi kami. kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat mahluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami."

2. URAIAN MATERI

2.1. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga

negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja ketentuan ini, tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia.

Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi?

Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di

Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan

2.2. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut
Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk: membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing, mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini di antaranya kewajiban untuk: memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya;
3. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk: menempatkan

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;,, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamankan setiap warga negara untuk: mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusantidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamankan setiap warga negara untuk :
 - Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar
 - Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila- Sila Pancasila.

Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

Apabila Anda telaah UUD NRI Tahun 1945, baik naskah sebelum ataupun setelah perubahan, Anda akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat Anda identifikasi mulai dari Pasal 26 sampai Pasal 34. Dalam ketentuan tersebut, diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

1. Hak atas Kewarganegaraan Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat (1) dan (2)
2. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1)
3. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan Pasal 27 ayat (2)

4. Hak dan kewajiban bela negara Pasal 27 ayat (3)
5. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Pasal 28
6. kemerdekaan memeluk agama Pasal 29 ayat (1) dan (2)
7. Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2).
8. hak mendapat pendidikan pasal 31 ayat (1) dan (2)
9. kebudayaan nasional pasal 32 ayat (2)
10. perekonomian pasal 33 ayat (1) sampai (5)
11. kesejahteraan sosial pasal 34 ayat (1) sampai (4)

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila.

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka.

Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari

2.3. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara.

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara.

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau peningkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau, bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang

yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

1. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
2. Sikap tidak toleran.
3. Penyalahgunaan kekuasaan
4. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.
5. Penyalahgunaan teknologi

2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung, karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan

HUMAN RIGHTS DAY

HUMAN RIGHTS FOR ALL!



Made with PosterMyWall.com

Gambar :
Ketik Disni (sumber: ketik disini)

Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi misalnya sebagai berikut.

1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan
2. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi

3. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya
4. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama

2.4. Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara.

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering Anda dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara.

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada

setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

2. Mengoptimalkan peran lembaga- lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing



GAMBAR :
KETIK DISNI (SUMBER: KETIK DISINI)

Rangkuman
Kata Kunci

Kata kunci yang harus Anda pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah warga negara, hak warga negara dan kewajiban warga negara

- Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang.
- Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya
- Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri.

- Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara.
- Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

“ Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama ”



Daftar Isi

Latihan Essay !

Jawablah dengan benar !

01. Jelaskan penertian kewajiban !

Alternatif penyelesaian

02. Bedakan antara pengertian Hak asasi dengan hak asasi warga negara !

Alternatif penyelesaian

03. Berikan tanggapan anda jika ada teman anda yang membuly !

Alternatif penyelesaian

04. Sebutkan faktor faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban !

Alternatif penyelesaian

05. Berikan contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

Latihan Pilihan Ganda I

1. Pancasila sebagai sumber nilai memiliki makna
- A konsensus mayoritas warga negara mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila
 - B sikap masyarakat menjadi landasan dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila
 - C gagasan tentang nilai-nilai Pancasila ditentukan secara mutlak untuk pedoman hidup
 - D nilai kerohanian dalam Pancasila menjadi sumber utama pengamalan bagi generasi muda
 - E seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila
-
2. Konstitusi di Indonesia dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dilihat dari sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap konstitusi yang dibuat oleh Negara maka ada tiga nilai, sedangkan nilai yang sesuai dengan konteks diatas yaitu:
- A nilai religi
 - B nilai estetika
 - C nilai materiel
 - D nilai spiritual
 - E nilai normatif
-
3. Budi merupakan anak dari keluarga kaya raya akan tetapi hal ini

tidak membuatnya menjadi sombong. Karena budi menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal diatas merupakan contoh sikap dari sila ke ..

- A nilai religi
- B nilai estetika
- C nilai materiel
- D nilai spiritual
- E nilai normatif

4. Hak yang diprioritaskan dalam pengaturan Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam Peraturan Perundang undangan adalah hak...

- A Melaksanakan kewajiban secara tegas
- B Pemberian hak yang adil
- C Tata cara dalam melakukan kewajiban
- D Pelaksanaan hak yang terorganisir
- E Kesetaraan antara warga Negara

5. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya, hal ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dipertahankan karena kalau sampai berubah Pancasila menjadi tidak berarti. Yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar Pancasila adalah

- A Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- B Ketuhanan, keberadaban, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial
- C Kemanusiaan yang adil dan beradab mengutamakan

persatuan Indonesia

- D toleransi antarumat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
- E Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan

6. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang selalu melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan pihaknya. Namun ada beberapa yang melalaikan hak dan kewajiban itu. Agar Indonesia menjadi lebih baik dalam melakukan hak dan kewajiban dengan baik, maka langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah...

- A Mempertegas pihak yang berwajib
- B Melakukan penegasan terhadap pelaku pelanggaran hak dan kewajiban
- C Menanamkan kesadaran pada semua orang akan pentingnya melakukan hak dan kewajiban dengan baik dan benar
- D Memperbaiki susunan kepemimpinan negara dari pusat hingga daerah agar menjadi lebih baik dan bebar serta tegas. Dan memperbaiki susunan masyarakat yang saling berkelompok
- E Menetapkan undang-undang yang lebih tegas dan tanpa pandang bulu

7. Hambatan penegakan HAM di Indonesia sebenarnya bukan karena kurangnya peraturan hukum tentang HAM. Ancaman hukuman berat dalam peraturan hukum tentang HAM Indonesia tidak dapat dilaksanakan akibat

- A belum adanya lembaga penegak hokum HAM di Indonesia
- B terbunuhnya aktivis HAM Munir

- C masih lemahnya sikap mental aparat penegak hukum
 - D kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan
 - E tidak adanya pressure dari masyarakat dalam masalah pelanggaran HAM
-

8. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai bangsa Indonesia harus mengemban kewajiban dan memahami benar amanat penderitaan rakyat dalam kerangka persatuan dan kesatuan. Beberapa waktu lalu terdapat kasus penghinaan lambang negara oleh artis ternama. Dia tak mengerti benar akan pentingnya pemahaman konteks Pancasila dalam mengemban kehidupan yang berdaulat. Agar kasus seperti itu tidak terjadi dalam kehidupan generasi penerus bangsa, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk menjalankan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dini?

- A Memahami arti penting pancasila dan seluk beluknya
 - B Menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya seorang pelajar
 - C Memahami hakikat demokrasi dalam kehidupan sehari hari
 - D Memahami dan mengamalkan isi pancasila dalam kehidupan sehari hari
 - E Memahami fungsi instrumen Negara
-

9. Andi pindah rumah dari Makasar ke Surabaya. Sekarang Andi tinggal satu kompleks perumahan dengan Anto. Anto penduduk asli Surabaya. Meskipun berbeda suku Andi dan Anto berteman baik. Suatu malam, musibah menimpa keluarga Andi. Rumahnya

mengalami kebakaran. Sebagai tetangga dan teman baik Anto mempunyai kewajiban

- A Meringankan beban yang diderita Andi
- B Menanggung semua kerugian akibat kebakaran
- C Mencari berita tentang musibah yang sedang terjadi
- D Memberi tahu teman-temannya tentang musibah yang dialami Andi
- E Mencari penyebab kebakaran dan menghitung kerugian yang diderita

10. Pemerintah daerah dalam membuat peraturan harus mampu mengakomodasi kepentingan rakyat sehingga menimbulkan rasa keadilan sosial. Salah satu contoh perwujudan keadilan sosial adalah

- A memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan agama
- B jaminan kebebasan dalam memberikan hak suara di pilkada
- C menghargai kebebasan untuk menyalurkan bakat dan minat diri
- D membangun penyediaan fasilitas umum di setiap pemukiman
- E kebebasan menentukan cara dalam memilih kebutuhan kehidupan

BENAR, Belajar Lebih Giat.



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penilaian Diri I

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Saya dapat memahami Makna hak dan kewajiban warga negara	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Saya dapat memahami Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Saya dapat mengetahui Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Saya dapat menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
05.	Saya dapat menganalisis penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Evaluasi

Soal 1.

Pancasila sebagai sumber nilai mempunyai tiga nilai penting, yaitu nilai...

- A. Dasar, Instrumental, dan Praksis
- B. Material, Vital, dan Kerohanian
- C. Realita, Idealisme, dan Fleksibilitas
- D. Dasar, Vital, dan Idealisme
- E. Instrumen, Realita, dan Idealism

Soal 2.

Mengatur hubungan manusia dan Sang Pencipta serta berkaitan dengan hak asasi yang paling asasi merupakan perwujudan Pancasila sebagai sumber nilai yang terdapat pada sila

- A. Ketuhanan Yang Maha Esa
- B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- C. Persatuan Indonesia

- D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
- E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Soal 3.

Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma yang diartikan sebagai

- A. Peraturan tingkah laku
- B. Lima dasar yang berisi aturan tingkah laku
- C. Kesusilaan yang lima
- D. Lima larangan
- E. Dasar falsafah Negara

Soal 4.

Sila-sila Pancasila tersusun secara hierarkis piramidal. Hal ini berarti....

- A. Sila yang satu mempunyai makna yang berbeda dengan sila yang lain
- B. Masing-masing sila saling terkait dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa
- C. Nilai sila yang ada di atas lebih luas dengan sila yang ada di bawah
- D. Sila yang ada di atas meliputi dan menjiwai sila yang ada di bawahnya
- E. Antara sila yang satu dengan yang lain masing-masing berdiri

sendiri

Soal 5.

Pernyataan berikut ini menunjukkan pentingnya ideologi bagi suatu negara, kecuali...

- A. Membangkitkan kesadaran pentingnya kemerdekaan
- B. Menanamkan semangat perjuangan melawan penjajah
- C. Menimbulkan rasa pesimis terhadap program pembangunan
- D. Mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup
- E. Membentuk rasa kebersamaan antaranggota masyarakat

Soal 6.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bagi setiap warga negara Indonesia, yaitu...

- A. Patuh pada aturan yang sesuai dengan keinginan
- B. Tunduk dan hormat kepada penguasa
- C. Mampu mengendalikan diri
- D. Loyal dan setia kepada atasan
- E. Melaksanakannya dalam praktik kehidupan sehari-hari

Soal 7.

Nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi Pancasila berasal dari bangsa Indonesia adalah

- A. Melindungi segenap bangsa Indonesia
- B. Memajukan kesejahteraan umum
- C. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
- E. Membentuk negara Indonesia yang adil dan makmur

Soal 8.

Pancasila merupakan kepribadian bangsa. Hal ini berarti Pancasila

- A. Diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia
- B. Memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia
- C. Semua rakyat Indonesia berperilaku dengan baik sesuai Pancasila
- D. Bangsa asing mengenal Indonesia dari kepribadiannya
- E. Tradisi bangsa Indonesia terbentuk sesuai dengan norma

Soal 9.

Perhatikan pernyataan berikut!

- 1) Sikap fanatik yang berlebihan.
- 2) Menghormati antarumat agama lain.

- 3) Mencampuradukkan ajaran agama.
- 4) Acuh tak acuh terhadap agama lain.
- 5) Menjaga ketenangan di tempat ibadah.

Dari pernyataan di atas, hal-hal yang harus kita hindari agar toleransi antarumat beragama dapat terbina ditunjukkan oleh nomor....

- A. 1) dan 2)
- B. 1) dan 3)
- C. 2) dan 4)
- D. 3) dan 5)
- E. 4) dan 5)

Soal 10.

Suatu ideologi bisa dikatakan terbuka sehingga mampu bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat harus memiliki dimensi....

- A. Realitas, Estetika, dan Waktu
- B. Idealisme, Estetika, dan Realitas
- C. Fieksibilitas, Estetika, dan Realitas
- D. Realitas, Idealisme, dan Waktu
- E. Idealitas, Realitas, dan Fieksibilitas

Soal 11.

Pancasila diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia sehingga digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut mencerminkan fungsi Pancasila sebagai....

- A. Dasar Negara
- B. Ideologi Nasional
- C. Perjanjian luhur
- D. Pandangan hidup Bangsa
- E. Kepribadian Bangsa

Soal 12.

Setelah melalui penyelidikan dan penyidikan tentang kasus pelanggaran HAM ,maka selanjutnya itu merupakan tugas dan wewenang Pengadilan HAM untuk memeriksa dan memutus jenis perkara Pelanggaran HAM

- A. yang dilakukan oleh negara
- B. Berat dan ringan
- C. Internasional
- D. yang ringan
- E. yang berat

Soal 13.

Pelanggaran HAM yang berbentuk kejahatan seperti penganiayaan, mencemarkan nama baik atau pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang sudah mengerti tentang HAM. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan upaya untuk memahami pentingnya penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM, dalam rangka

- A. Melindungi hak-hak minoritas warga negara
- B. Mendukung hak-hak mayoritas warga negara
- C. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- D. Melindungi hak setiap orang didalam masyarakat
- E. Memajukan pergaulan dalam hubungan Internasional

Soal 14.

Nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi Pancasila berasal dari bangsa Indonesia adalah....

- A. Melindungi segenap bangsa Indonesia
- B. Memajukan kesejahteraan umum
- C. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
- E. Membentuk negara Indonesia yang adil dan makmur

Soal 15.

Perhatikan contoh peristiwa berikut?

Tiba-tiba seorang ibu menyerobot lampu merah di traffic light dan hampir saja terjadi kecelakaan. Spontan seorang polisi mengejar pengendara tersebut dan diberhentikan kemudian diminta menunjukkan surat-surat kendaraan termasuk SIM dan ditunjukkan kesalahannya. Ternyata ibu tersebut adalah istrinya sendiri. Mohon maaf saya menilang anda karena telah melakukan kesalahan dalam berlalu lintas melanggar rambu-rambu dan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, begitu polisi itu berkata. Dan si ibu itu hanya menunjukkan muka kecewa dan sedih tetapi tidak dapat berkata-kata.

Dari kutipan peristiwa tersebut di atas menunjukkan

- A. Hukum tanpa pandang bulu
- B. Keputusan hukum yang tidak manusiawi.
- C. Hukum itu bebas dan tetapi tidak mandiri.
- D. Hukum itu tidak adil karena telah menindak istri sendiri
- E. Hukum adalah hukum harus mengesampingkan unsur yuridis.



Nilai	Deskripsi



e-Modul 2018
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Pustaka

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2008. Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis. [Online]. Tersedia: <http://www.jimly.com.Html> [27 September 2013] .
- Asshiddiqie, Jimly. (2008). Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. [Online]. Tersedia: <http://www.jimly.com.Html> [27 September 2013] .
- Bakry, Noor Ms. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, Dasim. 2002. Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio. Bandung: Ganesindo.
- Busroh, Abu Daud. 2009. Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kaelan. 2012. Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T.1992. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. Ilmu Negara.
Jakarta: Pradnya Paramita.

Kantaprawira, Rusadi. 2004. Sistem Politik Indonesia;
Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru
Algesindo



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan